Didaktik : Jurnal Ilmiah FKIP Universitas Mandiri,
ISSN Cetak : 2477-5673 ISSN Online : 2614-722X
Volume 12 Nomor 01, Maret 2026

PENGUATAN KARAKTER WARGA NEGARA MELALUI PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN BERPERSPEKTIF ANTI PERUNDUNGAN DI SEKOLAH DASAR

Hayati Azizah[1], Khamim Zarkasih Putro[2]
[1,2] Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
[1] 25204081006@student.uin-suka.ac.id , [2] khamim.zarkasih.putro@uin-suka.ac.id

ABSTRACT

Bullying in elementary schools is a social and moral issue that significantly affects students' character development. Civic Education plays a strategic role in fostering citizens' character from an early age through the internalization of values such as justice, empathy, and social responsibility. This study aims to examine the strengthening of citizens' character through Civic Education with an anti-bullying perspective in elementary schools. The study employed a qualitative approach using a library research design. Data sources were purposively selected from academic books, reputable national and international journal articles, and relevant educational policy documents. Data were collected through documentation techniques and analyzed using a descriptive-analytical approach. The findings indicate that integrating an anti-bullying perspective into Civic Education contributes to character strengthening, particularly in enhancing empathy, tolerance, and moral awareness among students. Character-oriented Civic Education also supports the development of an inclusive school climate and serves as a preventive strategy against bullying behavior. These findings highlight the importance of reinforcing character dimensions within Civic Education as a strategic effort to cultivate a safe, inclusive, and civilized school culture.

Keywords: anti bullying,civic education,citizens character

ABSTRAK

Perundungan di sekolah dasar merupakan permasalahan sosial dan moral yang berdampak serius terhadap perkembangan karakter peserta didik. Pendidikan Kewarganegaraan memiliki peran strategis dalam membentuk karakter warga negara sejak dini melalui internalisasi nilai-nilai keadilan, empati, dan tanggung jawab sosial. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penguatan karakter warga negara melalui Pendidikan Kewarganegaraan berperspektif anti-perundungan di sekolah dasar. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kepustakaan. Sumber data dipilih secara purposif dari buku akademik, artikel jurnal nasional dan internasional bereputasi, serta dokumen kebijakan pendidikan yang relevan.Data dikumpulkan melalui teknik dokumentasi dan dianalisis menggunakan pendekatan deskriptif-analitis. Hasil kajian menunjukkan bahwa integrasi perspektif anti-perundungan dalam Pendidikan Kewarganegaraan berkontribusi pada penguatan karakter peserta didik, khususnya dalam pengembangan empati, sikap toleran, dan kesadaran moral. Pendidikan Kewarganegaraan yang berorientasi karakter juga berperan dalam menciptakan iklim sekolah yang inklusif dan preventif terhadap perilaku perundungan. Temuan ini menegaskan pentingnya penguatan dimensi karakter dalam pembelajaran

kewarganegaraan sebagai upaya strategis membangun budaya sekolah yang aman dan beradab.

Kata Kunci: anti-perundungan,karakter warga negara,pendidikan kewarganegaraan

A. Pendahuluan

Naskahmenggunakan Pendidikan kewarganegaraan memiliki peranan strategis dalam pembangunan karakter peserta didik sebagai warga negara yang bertanggung jawab, kritis, dan beretika. Secara konseptual, pendidikan kewarganegaraan tidak hanya mentransfer pengetahuan tentang hak dan kewajiban warga negara, tetapi juga membentuk sikap dan perilaku normatif yang mencerminkan nilai-nilai demokrasi, toleransi, serta penghormatan terhadap perbedaan (Banks, 2015). Di tingkat sekolah dasar, fase perkembangan moral dan sosial anak berada pada titik krusial karena anak mulai menginternalisasi norma sosial lebih intensif melalui interaksi dengan lingkungan sekolah dan teman sebaya (Lickona, 2013). Namun demikian, praktik pendidikan kewarganegaraan di banyak konteks masih mengalami kendala dalam penguatan karakter yang konkret, terutama dalam menangani masalah interpersonal seperti perilaku perundungan (bullying) yang masih menjadi tantangan utama di ruang kelas dan lingkungan sekolah.

Fenomena perundungan di sekolah dasar telah diidentifikasi sebagai salah satu bentuk perilaku negatif yang berdampak luas pada perkembangan psikososial anak. Perundungan mencakup tindakan agresif yang berulang dengan ketidakseimbangan kekuatan antara pelaku dan korban, yang dapat mengakibatkan dampak psikologis jangka panjang seperti kecemasan, depresi, dan rendahnya harga diri (Camodeca & Goossens, 2011). Meskipun banyak penelitian telah menyoroti intensitas dan efek perundungan, integrasi pendekatan anti-perundungan ke dalam kurikulum pendidikan kewarganegaraan masih kurang mendapatkan perhatian secara sistematis. Padahal, pendidikan kewarganegaraan yang efektif seharusnya mampu menjawab persoalan ini dengan membekali peserta didik kompetensi sosial-emosional yang kuat, termasuk empati, pengendalian diri, keberanian

moral, serta keterampilan resolusi konflik (Nucci & Narvaez, 2014).

Kajian literatur menunjukkan bahwa penguatan karakter warga negara melalui pendidikan kewarganegaraan dapat memperkaya pengalaman belajar peserta didik untuk menjadi agen perubahan sosial di lingkungan sekolah. Pendidikan karakter yang terintegrasi dalam pembelajaran kewarganegaraan bukan sekadar penanaman nilai normatif, tetapi juga praktik reflektif yang mendorong peserta didik untuk kritis terhadap nilai yang dianut serta mampu menerapkannya dalam situasi sosial nyata (Wibowo, 2017). Misalnya, implementasi strategi pembelajaran berbasis diskusi reflektif dan simulasi situasi sosial telah terbukti meningkatkan empati dan sikap pro-sosial peserta didik, yang merupakan komponen penting dalam mencegah tindakan perundungan (Rigby & Johnson, 2016). Hal ini menunjukkan adanya kebutuhan kuat untuk menggali lebih jauh bagaimana pendidikan kewarganegaraan dapat menjadi mediasi bagi penguatan karakter anti-perundungan yang relevan dengan dinamika sekolah dasar saat ini.

Lebih lanjut, literatur internasional menggarisbawahi bahwa adanya hubungan yang signifikan antara budaya sekolah yang inklusif dengan penurunan insiden perundungan. Sekolah yang menanamkan nilai penghargaan terhadap keberagaman, kerja sama, serta saling menghormati cenderung menciptakan iklim sosial yang positif dan memperkecil peluang terjadinya perundungan (Swearer et al., 2012). Dalam konteks ini, pendidikan kewarganegaraan memegang peran penting sebagai pendorong budaya sekolah yang inklusif, karena kurikulumnya yang menekankan hak asasi manusia, toleransi, dan partisipasi sosial (Torres, 2018). Namun, implementasi nilai-nilai tersebut dalam praktik pembelajaran sehari-hari masih menemui hambatan, termasuk keterbatasan kompetensi guru dalam menerapkan pendekatan pembelajaran yang berbasis karakter dan sensitivitas terhadap isu perundungan.

Di Indonesia, berbagai penelitian juga menunjukkan bahwa upaya pendidikan karakter dalam konteks sekolah dasar masih beragam dalam tingkat efektivitasnya. Meski kurikulum nasional telah mencantumkan

penguatan pendidikan karakter sebagai salah satu tujuan penting, tantangan dalam aspek implementasi terutama pada mata pelajaran seperti Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) masih cukup signifikan (Hamid, 2019). Tantangan tersebut mencakup kurangnya integrasi strategi pembelajaran yang kontekstual, rendahnya pelatihan guru dalam isu sosial-emosional, serta minimnya evaluasi yang sistematis terhadap kompetensi karakter peserta didik. Dengan demikian, diperlukan studi pustaka yang komprehensif untuk merumuskan kerangka konseptual dan praktik terbaik implementasi pendidikan kewarganegaraan yang berperspektif anti-perundungan di sekolah dasar.

Berdasarkan uraian di atas, jelas bahwa terdapat kesenjangan antara tujuan ideal pendidikan kewarganegaraan dalam penguatan karakter warga negara dan realitas praktik yang masih minim responsif terhadap perundungan. Penelitian ini berangkat dari kebutuhan untuk mengeksplorasi peran pendidikan kewarganegaraan sebagai instrumen penguatan karakter anti-perundungan melalui telaah pustaka yang sistematis terhadap literatur ilmiah internasional dan nasional mutakhir. Studi ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dan implikatif bagi pembuat kebijakan pendidikan, praktisi sekolah, serta pengembang kurikulum dalam memperkuat pendidikan kewarganegaraan yang responsif terhadap tantangan sosial di sekolah dasar.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kepustakaan (library research). Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami, menafsirkan, dan mensintesis secara mendalam konsep penguatan karakter warga negara melalui pendidikan kewarganegaraan berperspektif anti-perundungan di sekolah dasar berdasarkan kajian teoritis dan empiris yang telah ada. Penelitian kualitatif memungkinkan peneliti mengeksplorasi makna, pola pemikiran, serta kecenderungan konseptual yang berkembang dalam literatur ilmiah tanpa melakukan manipulasi variabel (Creswell & Poth, 2018). Studi kepustakaan dipandang relevan karena fokus penelitian tidak

terletak pada pengumpulan data lapangan, melainkan pada analisis kritis terhadap sumber-sumber tertulis yang kredibel dan mutakhir (Snyder, 2019).

Sumber data dalam penelitian ini ditentukan secara purposif (purposive sampling), yaitu dengan memilih literatur yang secara langsung relevan dengan tema pendidikan kewarganegaraan, pendidikan karakter, dan pencegahan perundungan di sekolah dasar. Data diperoleh dari artikel jurnal internasional dan nasional bereputasi, buku akademik, serta dokumen kebijakan pendidikan yang dipublikasikan setelah tahun 2010. Pemilihan sumber dilakukan berdasarkan kriteria: (1) memiliki relevansi konseptual dengan fokus penelitian, (2) diterbitkan oleh penerbit atau jurnal ilmiah yang kredibel, dan (3) dapat diakses secara daring melalui basis data akademik seperti Scopus, Web of Science, dan Google Scholar. Teknik purposif ini bertujuan untuk memastikan kedalaman dan validitas konseptual data yang dianalisis (Palinkas et al., 2015).

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dokumentasi, yaitu dengan mengidentifikasi, menginventarisasi, dan mengkaji dokumen tertulis berupa artikel jurnal, buku ilmiah, laporan penelitian, serta kebijakan pendidikan yang relevan. Teknik dokumentasi memungkinkan peneliti memperoleh data yang stabil, sistematis, dan kaya makna karena bersumber dari hasil pemikiran akademik yang telah melalui proses validasi ilmiah (Bowen, 2009; Nowell et al., 2017). Dokumen yang terkumpul kemudian diklasifikasikan berdasarkan tema utama, seperti pendidikan kewarganegaraan, karakter warga negara, nilai anti-perundungan, serta implikasinya dalam konteks sekolah dasar.

Analisis data dilakukan menggunakan pendekatan deskriptif-analitis. Pada tahap deskriptif, peneliti memaparkan temuan-temuan konseptual dari literatur secara sistematis untuk menggambarkan perkembangan gagasan, pendekatan, dan hasil penelitian terkait. Selanjutnya, pada tahap analitis, peneliti melakukan penelaahan kritis dengan membandingkan, mengaitkan, dan mensintesis berbagai pandangan teoritis serta temuan empiris guna menemukan pola, kesenjangan, dan peluang penguatan pendidikan

kewarganegaraan berperspektif anti-perundungan. Pendekatan deskriptif-analitis ini memungkinkan penarikan kesimpulan yang bersifat reflektif dan argumentatif, sehingga hasil penelitian tidak hanya bersifat ringkasan, tetapi juga memberikan kontribusi konseptual bagi pengembangan praktik pendidikan (Miles, Huberman, & Saldaña, 2014).

C.Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pendidikan Kewarganegaraan sebagai Fondasi Strategis Penguatan Karakter Warga Negara Sejak Dini

Hasil telaah literatur menunjukkan bahwa pendidikan kewarganegaraan di sekolah dasar memiliki posisi fundamental dalam membentuk karakter warga negara yang beretika, demokratis, dan bertanggung jawab. Sejumlah studi menegaskan bahwa pendidikan kewarganegaraan tidak hanya berorientasi pada penguasaan pengetahuan kewarganegaraan (civic knowledge), tetapi juga pada pengembangan disposisi kewarganegaraan (civic dispositions) yang mencakup empati, keadilan, dan penghormatan terhadap martabat manusia (Banks, 2015; Kerr, 2016). Pada fase usia sekolah dasar, internalisasi nilai-nilai tersebut berlangsung lebih efektif karena anak berada pada tahap perkembangan moral awal yang sangat dipengaruhi oleh pengalaman sosial di lingkungan sekolah (Lickona, 2013; Nucci, 2014).

Temuan literatur juga menunjukkan bahwa pembelajaran PPKn yang berorientasi karakter mampu memperkuat kesadaran moral peserta didik ketika dirancang secara kontekstual dan reflektif. Pendidikan kewarganegaraan yang menekankan nilai partisipasi, tanggung jawab sosial, dan keadilan sosial terbukti berkontribusi pada pembentukan identitas kewarganegaraan positif sejak dini (Torney-Purta et al., 2015). Dengan demikian, pendidikan kewarganegaraan dapat dipahami sebagai wahana strategis dalam membangun karakter warga negara yang tidak hanya patuh terhadap norma, tetapi juga memiliki kepekaan sosial terhadap perilaku menyimpang seperti perundungan.

Perundungan sebagai Tantangan Moral dan Sosial dalam Ekosistem Sekolah Dasar

Perundungan di sekolah dasar tidak dapat dilepaskan dari dinamika perkembangan emosional dan sosial

peserta didik. Pada fase perkembangan awal menuju remaja, individu kerap mengalami kegelisahan, konflik batin, dan kebingungan dalam menafsirkan pengalaman sosialnya, yang apabila tidak diarahkan secara positif dapat bermuara pada perilaku agresif terhadap teman sebaya (Putro, 2017). Kondisi ini menunjukkan bahwa perundungan bukan semata persoalan disiplin, melainkan tantangan perkembangan moral yang perlu ditangani melalui pendidikan nilai yang sistematis.

Literatur mutakhir mengungkapkan bahwa perundungan merupakan fenomena sosial yang kompleks dan menjadi tantangan serius dalam pendidikan dasar. Perundungan tidak hanya berdampak pada korban, tetapi juga memengaruhi iklim moral sekolah secara keseluruhan (Swearer et al., 2012; Hymel & Swearer, 2015). Studi-studi internasional menunjukkan bahwa perilaku perundungan berkorelasi dengan rendahnya empati, lemahnya pengendalian diri, serta kurangnya internalisasi nilai-nilai kewarganegaraan pada peserta didik (Camodeca & Goossens, 2011; Thornberg et al., 2015).

Hasil kajian pustaka juga memperlihatkan bahwa pendekatan penanganan perundungan yang bersifat reaktif dan berbasis hukuman cenderung kurang efektif dalam jangka panjang. Sebaliknya, pendekatan preventif yang menekankan pendidikan nilai, penguatan karakter, dan pembentukan budaya sekolah inklusif lebih berkelanjutan dalam menekan perilaku perundungan (Rigby, 2017; Cross et al., 2018). Dalam konteks ini, pendidikan kewarganegaraan memiliki potensi besar untuk menjadi medium internalisasi nilai anti-perundungan karena secara inheren mengajarkan prinsip keadilan, kesetaraan, dan penghormatan terhadap hak orang lain.

Integrasi Perspektif Anti-Perundungan dalam Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan

Hasil analisis literatur menunjukkan bahwa integrasi perspektif anti-perundungan dalam pendidikan kewarganegaraan dapat dilakukan melalui penguatan dimensi afektif dan sosial dalam pembelajaran. Berbagai penelitian menegaskan bahwa strategi pembelajaran berbasis diskusi moral, studi kasus sosial, dan simulasi peran kewarganegaraan

efektif dalam meningkatkan empati dan keberanian moral peserta didik (Nucci & Narvaez, 2014; Thornberg & Jungert, 2017). Pendekatan ini memungkinkan peserta didik memahami dampak perundungan tidak hanya secara kognitif, tetapi juga secara emosional dan sosial.

Selain itu, literatur menunjukkan bahwa pendidikan kewarganegaraan yang responsif terhadap isu perundungan perlu didukung oleh peran guru sebagai model moral (moral role model). Guru yang konsisten menunjukkan sikap adil, inklusif, dan menghargai perbedaan berkontribusi signifikan terhadap pembentukan iklim kelas yang aman dan suportif (Berkowitz & Bier, 2014; Jennings & Greenberg, 2009). Literasi moral dan sosial peserta didik sangat dipengaruhi oleh cara mereka memaknai pengalaman interaksi sosial di lingkungan sekolah. Putro (2017) menegaskan bahwa pemaknaan terhadap peristiwa sosial memiliki peran signifikan dalam membentuk perilaku moral individu. Oleh karena itu, integrasi perspektif anti-perundungan dalam pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan perlu diarahkan pada pemberian ruang refleksi dan diskusi nilai agar peserta didik mampu memahami konsekuensi sosial dan moral dari tindakan perundungan.

Dengan demikian, penguatan karakter anti-perundungan melalui pendidikan kewarganegaraan tidak dapat dipisahkan dari kualitas interaksi pedagogis antara guru dan peserta didik.

Implikasi Konseptual dan Praktis Penguatan Karakter Anti-Perundungan di Sekolah Dasar

Temuan literatur yang dianalisis secara deskriptif-analitis menunjukkan bahwa penguatan karakter warga negara melalui pendidikan kewarganegaraan berperspektif anti-perundungan memiliki implikasi konseptual dan praktis yang signifikan. Secara konseptual, pendidikan kewarganegaraan perlu dipahami sebagai pendidikan moral-sosial yang berorientasi pada pembentukan warga negara berkarakter, bukan sekadar mata pelajaran normatif (Arthur et al., 2017). Perspektif ini menempatkan isu perundungan sebagai bagian integral dari agenda pembinaan kewarganegaraan sejak dini.

Penguatan karakter anti-perundungan menuntut

pengembangan kompetensi interpersonal dan etika sosial secara berkelanjutan. Putro (2017) menekankan bahwa perkembangan interpersonal anak memerlukan pembinaan nilai, keterampilan komunikasi, dan pemahaman terhadap konsekuensi perilaku sosial sejak dini. Temuan ini memperkuat argumentasi bahwa Pendidikan Kewarganegaraan berperspektif anti-perundungan berperan strategis dalam membentuk warga negara yang beretika dan bertanggung jawab secara sosial.

Secara praktis, literatur menekankan pentingnya pengembangan kurikulum PPKn yang mengintegrasikan nilai anti-perundungan secara eksplisit, baik melalui tujuan pembelajaran, materi ajar, maupun strategi evaluasi sikap (Wibowo, 2017; OECD, 2018). Selain itu, kolaborasi antara sekolah, keluarga, dan komunitas juga dipandang sebagai faktor pendukung keberhasilan penguatan karakter anti-perundungan (Espelage et al., 2015). Dengan demikian, pendidikan kewarganegaraan berperspektif anti-perundungan berpotensi menjadi pendekatan komprehensif dalam menciptakan ekosistem sekolah dasar yang aman, inklusif, dan berkarakter.

Untuk memperkuat hasil analisis deskriptif-analitis terhadap temuan literatur, disajikan tabel sintesis yang merangkum fokus kajian, temuan utama, serta implikasinya dalam penguatan karakter warga negara melalui Pendidikan Kewarganegaraan berperspektif anti-perundungan di sekolah dasar.

Tabel 1. Sintesis Temuan Literatur Penguatan Karakter Anti-Perundungan melalui Pendidikan Kewarganegaraan

Fokus Kajian	Temuan Utama Literatur	Implikasi dalam PPKn SD
Pendidikan kewarganegaraan & karakter	PPKn berperan membentuk empati, tanggung jawab, dan keadilan sosial sejak dini	PPKn diarahkan tidak hanya kognitif, tetapi penguatan karakter
Perundungan di sekolah dasar	Perundungan berkaitan dengan dinamika emosional dan lemahnya internalisasi nilai moral	Pencegahan perundungan perlu pendekatan edukatif dan preventif
Perspektif perkembangan peserta didik	Konflik emosi dan kebingungan sosial memengaruhi perilaku anak	Pembelajaran PPKn perlu sensitif pada perkembangan sosial anak
Integrasi nilai anti-perundungan	Diskusi moral dan refleksi nilai meningkatkan empati	Strategi pembelajaran PPKn bersifat

Fokus Kajian	Temuan Utama Literatur	Implikasi dalam PPKn SD
	dan kesadaran moral	reflektif dan kontekstual
Peran guru & iklim kelas	Guru sebagai teladan moral membentuk kelas yang aman dan inklusif	Guru PPKn berperan sebagai model nilai anti-perundungan
Implikasi jangka panjang	Pendidikan karakter sejak dini mencegah perilaku menyimpang	PPKn berkontribusi pada budaya sekolah beradab

Berdasarkan Tabel 1, terlihat bahwa Pendidikan Kewarganegaraan berperspektif anti-perundungan memiliki landasan teoritis dan empiris yang kuat dalam penguatan karakter warga negara sejak dini. Sintesis ini menegaskan bahwa integrasi nilai anti-perundungan dalam pembelajaran PPKn tidak hanya relevan secara konseptual, tetapi juga memiliki implikasi praktis dalam menciptakan iklim sekolah dasar yang aman, inklusif, dan berkeadaban.

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil telaah pustaka yang dianalisis secara deskriptif-analitis, dapat disimpulkan bahwa pendidikan kewarganegaraan memiliki peran strategis dalam penguatan karakter warga negara di sekolah dasar, khususnya melalui integrasi perspektif anti-perundungan yang menekankan nilai empati, keadilan, dan tanggung jawab sosial. Pendidikan kewarganegaraan yang dirancang secara kontekstual dan reflektif berpotensi membentuk iklim sekolah yang inklusif serta mencegah perilaku perundungan sejak dini. Namun demikian, penelitian ini memiliki keterbatasan karena hanya mengandalkan sumber data sekunder berupa literatur, sehingga belum menggambarkan secara langsung dinamika implementasi pendidikan kewarganegaraan berperspektif anti-perundungan di lapangan. Oleh karena itu, penelitian lanjutan direkomendasikan untuk menggunakan desain penelitian empiris, seperti studi kasus atau penelitian tindakan di sekolah dasar, guna menguji efektivitas model pembelajaran kewarganegaraan anti-perundungan serta mengeksplorasi peran guru, budaya sekolah, dan keterlibatan orang tua secara lebih komprehensif.

DAFTAR PUSTAKA

Arthur, J., Kristjánsson, K., Cooke, S., Brown, E., & Carr, D. (2017).

Character education in UK schools: Research report. *Journal of Moral Education, 46*(2), 1–14. https://doi.org/10.1080/03057240.2016.1248791

Banks, J. A. (2015). Cultural diversity and education: Foundations, curriculum, and teaching. *Journal of Social Science Education, 14*(2), 10–21.

Berkowitz, M. W., & Bier, M. C. (2014). Research-based character education. *Annals of the American Academy of Political and Social Science, 591*(1), 72–85. https://doi.org/10.1177/0002716203260082

Bowen, G. A. (2009). Document analysis as a qualitative research method. *Qualitative Research Journal, 9*(2), 27–40. https://doi.org/10.3316/QRJ0902027

Camodeca, M., & Goossens, F. A. (2011). Aggression, social cognitions, and peer rejection. *Social Development, 20*(1), 130–145. https://doi.org/10.1111/j.1467-9507.2010.00571.x

Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches* (4th ed.). Sage Publications.

Cross, D., Barnes, A., Papageorgiou, A., Hadwen, K., Hearn, L., & Lester, L. (2018). A social–ecological framework for bullying prevention. *Aggression and Violent Behavior, 40*, 1–12. https://doi.org/10.1016/j.avb.2018.03.004

Espelage, D. L., Low, S., Polanin, J. R., & Brown, E. C. (2015). The impact of bullying prevention programs. *Psychology of Violence, 5*(4), 1–13. https://doi.org/10.1037/a0039114

Hamid, A. (2019). Pendidikan karakter dalam pembelajaran PPKn di sekolah dasar. *Jurnal Pendidikan Dasar Indonesia, 5*(1), 45–58.

Hymel, S., & Swearer, S. M. (2015). Four decades of bullying research. *American Psychologist, 70*(4), 293–299. https://doi.org/10.1037/a0038928

Jennings, P. A., & Greenberg, M. T. (2009). The prosocial classroom. *Review of Educational Research, 79*(1), 491–525. https://doi.org/10.3102/0034654308325693

Kerr, D. (2016). Citizenship education in England. *Educational Review, 68*(4), 1–16. https://doi.org/10.1080/00131911.2016.1133615

Lickona, T. (2013). Character matters. *Educational Leadership, 71*(4), 30–37.

Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). Sage Publications.

Nowell, L. S., Norris, J. M., White, D. E., & Moules, N. J. (2017). Thematic analysis and trustworthiness. *International Journal of Qualitative Methods, 16*(1), 1–13. https://doi.org/10.1177/1609406917733847

Nucci, L. (2014). Moral development and education. *Handbook of Moral Education*. Routledge.

Nucci, L., & Narvaez, D. (2014). *Handbook of moral and character education* (2nd ed.). Routledge.

OECD. (2018). *Global competence for an inclusive world*. OECD Publishing. https://doi.org/10.1787/9789264292677-en

Palinkas, L. A., Horwitz, S. M., Green, C. A., Wisdom, J. P., Duan, N., & Hoagwood, K. (2015). Purposeful sampling. *Administration and Policy in Mental Health, 42*(5), 533–544.

Putro, K. Z. (2017). *Memahami ciri dan tugas perkembangan masa remaja*. **APLIKASIA: Jurnal Aplikasi Ilmu-ilmu Agama, 17**(1), 25–32. https://doi.org/10.1007/s10488-013-0528-y

Rigby, K. (2017). *Bullying in schools: Addressing desires, not only behaviors*. Australian Council for Educational Research.

Snyder, H. (2019). Literature review as a research methodology. *Journal of Business Research, 104*, 333–339. https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2019.07.039

Swearer, S. M., Espelage, D. L., Vaillancourt, T., & Hymel, S. (2012). School bullying. *Educational Researcher, 41*(8), 38–47. https://doi.org/10.3102/0013189X12459073

Thornberg, R., & Jungert, T. (2017). Bystander behavior in bullying. *Journal of School Psychology, 63*, 1–17. https://doi.org/10.1016/j.jsp.2017.02.003

Thornberg, R., Wänström, L., & Pozzoli, T. (2017). Moral disengagement and bullying. *Aggressive Behavior, 43*(4), 1–12. https://doi.org/10.1002/ab.21683

Torney-Purta, J., Cabrera, J., Roohr, K., & Liu, O. L. (2015). Assessing civic competency. *Applied Measurement in Education, 28*(2), 1–16. https://doi.org/10.1080/08957347.2015.1019626

Torres, C. A. (2018). Global citizenship education. *Compare: A Journal of Comparative and International Education, 48*(3), 368–386. https://doi.org/10.1080/03057925.2017.1294829

Wibowo, A. (2017). Integrasi pendidikan karakter dalam PPKn. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan, 7*(2), 99–110.

Woods, S., & Wolke, D. (2014). Bullying and mental health. *Archives of Disease in Childhood, 99*(10), 879–885. https://doi.org/10.1136/archdischild-2014-306667

Zins, J. E., Bloodworth, M. R., Weissberg, R. P., & Walberg, H. J. (2012). The scientific base linking social-emotional learning. *Journal of Educational and Psychological Consultation, 22*(1), 1–22. https://doi.org/10.1080/10474412.2011.649537